

Kajian Peran Infrastruktur dalam Pengembangan Ekonomi Wilayah

Fitriani^{1*}, Anindiya Hukmi²^{1,2} Program Studi Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia*Email: fitriani77@gmail.com

ABSTRACT

Infrastructure development plays a strategic role in driving regional economic growth in Indonesia. Adequate infrastructure can improve connectivity, increase the efficiency of goods and services distribution, and encourage investment. This study aims to examine the role of infrastructure in regional economic development in Indonesia by 2025, with an emphasis on interregional connectivity, equitable development, and strengthening regional competitiveness. The method used is a literature review with a descriptive-qualitative approach. The results show that the development of transportation, energy, telecommunications, and logistics infrastructure has had a positive impact on increasing productivity and economic inclusion. However, challenges remain in the aspects of equitable development, budget constraints, and cross-sector coordination. This study recommends accelerating region-based infrastructure development and strengthening synergies between the central government, regional governments, and the private sector.

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



Article History

Received 2025-10-01

Revised 2025-11-17

Accepted 2025-11-26

Keywords

Infrastruktur,
Pengembangan,
Ekonomi Wilayah,
Distribusi,
Investasi

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Infrastruktur yang memadai berperan dalam menurunkan biaya logistik, memperluas akses pasar, dan mempercepat arus distribusi barang dan jasa (World Bank, 2022). Bagi Indonesia, yang merupakan negara kepulauan dengan distribusi geografis yang luas, infrastruktur menjadi faktor strategis untuk menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2025, pemerintah menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama, terutama dalam upaya pemerataan pembangunan antarwilayah. Selain sebagai penggerak ekonomi, infrastruktur juga memiliki peran sosial dan lingkungan yang signifikan. Jaringan transportasi yang baik dapat mempermudah mobilitas masyarakat, akses layanan kesehatan, serta mempercepat distribusi bantuan saat terjadi bencana. Ketersediaan listrik, air bersih, dan jaringan internet berkecepatan tinggi dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing daerah (BPS, 2024). Dengan demikian, infrastruktur menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Di tahun 2025, Indonesia dihadapkan pada tantangan global yang kompleks seperti perlambatan ekonomi dunia, ketidakpastian perdagangan internasional, serta tekanan untuk beralih menuju ekonomi rendah karbon. Kondisi ini menuntut adanya infrastruktur yang tidak hanya modern, tetapi juga adaptif terhadap perubahan iklim dan ramah lingkungan (ADB, 2023). Hal ini berarti konsep pembangunan infrastruktur harus bertransformasi dari sekadar penyediaan fisik menuju pengelolaan yang berkelanjutan.

Kesenjangan pembangunan antarwilayah masih menjadi persoalan mendasar. Kawasan barat Indonesia, khususnya Pulau Jawa, masih mendominasi pertumbuhan ekonomi karena memiliki infrastruktur yang lebih maju, sementara kawasan timur Indonesia seperti Maluku dan Papua relatif tertinggal (Bappenas, 2024). Ketimpangan ini berdampak pada rendahnya

daya saing wilayah tertentu serta memicu ketidakseimbangan migrasi dan distribusi penduduk. Oleh karena itu, strategi pemerataan infrastruktur menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan nasional.

Konektivitas antardaerah merupakan kunci dalam memperkuat integrasi ekonomi wilayah. Pembangunan jalan tol lintas pulau, pengembangan pelabuhan laut dalam, serta peningkatan kapasitas bandara internasional merupakan langkah penting untuk menghubungkan pusat produksi dengan pasar domestik maupun global. Infrastruktur yang baik juga mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, industri kreatif, dan perdagangan internasional (Kementerian Perhubungan, 2024). Selain transportasi, sektor infrastruktur energi menjadi fondasi vital bagi aktivitas ekonomi. Akses terhadap listrik yang andal dan terjangkau dapat mendorong pertumbuhan industri dan UMKM di berbagai daerah. Pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan juga semakin penting untuk mendukung transisi energi yang ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil (Kementerian ESDM, 2024). Integrasi antara pembangunan infrastruktur energi dan kebijakan industri akan mempercepat transformasi ekonomi.

Pengembangan infrastruktur digital juga menjadi fokus utama pada era ekonomi berbasis teknologi. Akses internet cepat dan terjangkau memungkinkan pelaku usaha di daerah untuk terhubung dengan pasar yang lebih luas, memfasilitasi perdagangan elektronik, serta meningkatkan efisiensi layanan publik. Infrastruktur digital juga memperkuat literasi teknologi masyarakat sehingga mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi global (Kominfo, 2024).

Melihat urgensi dan kompleksitas peran infrastruktur, kajian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi infrastruktur terhadap pengembangan ekonomi wilayah di Indonesia pada tahun 2025. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi konektivitas, pemerataan pembangunan, daya saing daerah, serta keberlanjutan lingkungan. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan pembangunan infrastruktur yang efektif dan inklusif.

TINJAUAN PUSTAKA

Infrastruktur

Salah satu Infrastruktur adalah komponen biaya tak lancar yang langsung mendukung produksi. Menurut Peraturan Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, infrastruktur terdiri dari fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur. untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Fasilitas yang memungkinkan aktivitas ekonomi dan pasar, seperti jaringan transportasi, distribusi, komunikasi, air, saluran air, dan sistem persediaan energi, dikenal sebagai infrastruktur. Infrastruktur juga didefinisikan sebagai fasilitas fisik yang dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti menyediakan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, dan transportasi untuk mendukung tujuan ekonomi dan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sistem infrastruktur berfungsi sebagai pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi. Sistem infrastruktur terdiri dari fasilitas atau struktur dasar, peralatan, dan instalasi.

Infrastruktur dapat diklasifikasikan sebagai modal sosial atau kapital sosial. Infrastruktur dianggap sebagai modal overhead sosial, berbeda dengan modal yang berdampak langsung pada kegiatan produksi. Perluasan infrastruktur meningkatkan produktivitas perekonomian, taraf hidup masyarakat, dan stok modal. Pengeluaran pemerintah akan meningkat lebih cepat dari PDB, menurut teori ini. Dengan kata lain, elastisitas pengeluaran pemerintah terhadap PDB lebih besar dari satu, dan pendapatan per kapita akan meningkat bersamaan dengan pengeluaran pemerintah.

Jenis infrastruktur yang berbeda berdampak pada pertumbuhan ekonomi dengan cara yang berbeda. Akibatnya, intervensi pemerintah diperlukan untuk alokasi dana yang efisien jika terjadi eksternalitas yang signifikan. Kekuatan penawaran dan permintaan, serta kebijakan publik, memengaruhi pengadaan infrastruktur (Canning, D., 1999).

Infrastruktur Jalan

Jalan adalah infrastruktur transportasi yang menghubungkan area tertentu satu sama lain. Jalan umum dibagi menjadi jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Sebagai bagian dari infrastruktur pengangkutan, infrastruktur jalan membantu pertumbuhan ekonomi karena memungkinkan lebih banyak orang untuk menggunakan modal komplementer, yang menghasilkan proses produksi dan distribusi yang lebih efisien. Pembangunan prasarana jalan turut akan meningkatkan pertumbuhan wilayah-wilayah baru dengan meningkatnya volume lalu lintas. Sebaliknya prasarana jalan yang buruk dan rusak akan menghambat alokasi sumber daya, pengembangan industri, pendistribusian faktor produksi, barang dan jasa yang ada.

Infrastruktur Listrik

Pembangkit listrik, distribusi, transmisi, dan instrumen kelistrikan lainnya yang membantu pertumbuhan ekonomi dikenal sebagai infrastruktur listrik. Dengan semakin berkembangnya sebuah daerah, mendapatkan listrik menjadi kebutuhan penting bagi rumah tangga dan kegiatan ekonomi, terutama industri. Semakin banyak peralatan rumah tangga, peralatan kantor, dan aktivitas sosial yang membutuhkan listrik dalam kehidupan masyarakat modern. Penambahan aktivitas ekonomi, termasuk investasi dan produksi, membutuhkan pasokan listrik yang memadai. Oleh karena itu permintaan listrik meningkat dari tahun ke tahun baik dari segi kuantitasnya maupun kualitasnya. Sebagian besar kebutuhan listrik di Indonesia dipenuhi oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). Sementara sebagian lagi masih disuplai oleh perusahaan-perusahaan non PLN.

Infrastruktur Air

Dalam hal penyediaan air bersih, Perusahaan Daerah Udara Minum (PDAM) adalah pengelola air bersih yang utama di Indonesia. Infrastruktur air mencakup segala sarana dan prasarana yang berguna untuk mendukung penyediaan air di suatu wilayah, seperti penyediaan air bersih, sistem sanitasi, dan drainase.

Infrastruktur Pendidikan

Untuk mendukung proses pendidikan, infrastruktur pendidikan sangat penting. Jika tidak, pendidikan tidak dapat dilakukan dengan baik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ada tiga tingkat pendidikan di Indonesia: formal, non-formal, dan informal.

Infrastruktur Kesehatan

Kesehatan dapat dianggap sebagai sasaran dari berbagai tujuan, yang merupakan puncak yang ingin dicapai oleh individu, rumah tangga, dan masyarakat; oleh karena itu, kesehatan dapat dianggap sebagai Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap nilai tambah barang dan jasa. Beberapa pakar ekonomi berpendapat bahwa kesehatan adalah peristiwa ekonomi yang dapat dianggap sebagai stok atau dinilai sebagai investasi.

Infrastruktur Pasar

Pasar, menurut BPS (2022), adalah tempat di mana penjual dan pembeli barang dan jasa bertemu. Berdasarkan lokasinya, pasar terdiri dari pasar yang menggunakan bangunan yang bersifat permanen, semi permanen, atau pun tanpa bangunan. Barang yang diperjualbelikan di pasar dapat terdiri dari berbagai komoditas (campuran) atau bahkan suatu komoditas tertentu secara khusus.

Infrastruktur sangat penting untuk menghubungkan berbagai pusat ekonomi dengan wilayah penyangganya. Biasanya, orang yang tinggal di daerah terpencil yang sulit dijangkau, seperti di lereng gunung atau lembah, hidup dalam kemiskinan dan terisolasi dari kemajuan pembangunan di pusat pertumbuhan terdekat. Kaum petani di daerah terpencil menghadapi kesulitan dalam memasarkan produk pertanian mereka karena kendala geografis yang ada. Walaupun bisa, kaum petani yang penghasilannya tidak seberapa tersebut harus membayar dengan biaya yang mahal. Kaum miskin tidak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau meningkatkan efisiensi kerja mereka karena kendala ini. Di sinilah pembangunan infrastruktur dapat berperan dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu dengan memberi kaum miskin lebih banyak akses ke intervensi pemerintah dan mengurangi biaya hidup. Akses yang lebih baik akan mampu menurunkan biaya hidup, meningkatkan pendapatan, dan memberi kaum miskin kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai kemajuan suatu daerah. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan output atau nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam periode tertentu (Todaro & Smith, 2020). Dalam konteks daerah, pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk investasi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia (SDM), kebijakan fiskal daerah, dan akses pasar.

Investasi infrastruktur, khususnya, berperan penting dalam menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang baik, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya, dapat meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa, mengurangi biaya transportasi, dan mempercepat waktu pengiriman. Hal ini memungkinkan pelaku usaha untuk beroperasi lebih efektif dan meningkatkan daya saing mereka di pasar. Selain itu, infrastruktur yang memadai juga dapat menarik investasi baru, yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pemerintah daerah memegang peranan kunci dalam menciptakan iklim ekonomi yang kondusif melalui pembangunan fisik dan kebijakan strategis. Dengan merumuskan kebijakan yang mendukung investasi dan pengembangan infrastruktur, pemerintah daerah dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang vital. Menurut BPS Provinsi Lampung (2023), pertumbuhan ekonomi Lampung menunjukkan tren positif setelah pandemi, terutama pada sektor-sektor yang mendapatkan dukungan infrastruktur seperti transportasi, konstruksi, dan pertanian. Sektor-sektor ini tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan akses terhadap layanan dasar.

Dengan demikian, hubungan antara pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi menjadi sangat erat, terutama dalam konteks daerah berkembang seperti di Indonesia. Pembangunan infrastruktur yang terencana dan berkelanjutan dapat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk terus berinvestasi dalam infrastruktur dan mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan mendorong kemajuan daerah secara keseluruhan. Dalam menghadapi tantangan global dan lokal, pemerintah daerah juga perlu beradaptasi dan berinovasi dalam pendekatan pembangunan infrastruktur, termasuk mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan dampak lingkungan. Dengan demikian,

pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Sumber data berasal dari laporan resmi pemerintah (BPS, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan), publikasi Bank Dunia, jurnal akademik, dan berita ekonomi terkini. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan: 1). Identifikasi indikator pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi wilayah. 2). Klasifikasi peran infrastruktur berdasarkan sektor (transportasi, energi, telekomunikasi, logistik). Dan 3). Analisis keterkaitan infrastruktur dengan pemerataan pembangunan dan peningkatan daya saing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Infrastruktur Dalam Konektivitas Wilayah

Infrastruktur transportasi memegang peran penting dalam menghubungkan pusat-pusat ekonomi, kawasan industri, serta daerah hinterland. Proyek strategis nasional seperti Jalan Tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatera telah menjadi tulang punggung distribusi barang dan jasa di Pulau Jawa dan Sumatera. Sementara itu, rencana pengembangan jalur kereta api di Kalimantan dan Sulawesi diharapkan dapat memperluas konektivitas antarwilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Menurut Kementerian Perhubungan (2024), keberadaan akses transportasi yang memadai dapat mengurangi biaya logistik hingga 30% dan mempercepat arus barang maupun mobilitas tenaga kerja.

Peningkatan konektivitas wilayah tidak hanya berdampak pada penurunan biaya distribusi, tetapi juga mendorong pemerataan ekonomi. Daerah yang sebelumnya terisolasi kini dapat terhubung dengan pusat perdagangan, sehingga membuka peluang investasi dan mengembangkan potensi ekonomi lokal. Misalnya, pengoperasian tol dan jalur kereta api mempercepat arus komoditas pertanian dari daerah penghasil menuju pasar utama, sehingga petani mendapatkan harga jual yang lebih baik (Bappenas, 2024).

Selain transportasi darat, pembangunan dan modernisasi pelabuhan laut dalam seperti Pelabuhan Patimban di Jawa Barat dan Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara juga berperan strategis dalam meningkatkan konektivitas logistik nasional. Infrastruktur pelabuhan yang efisien mempersingkat waktu bongkar muat dan memperlancar perdagangan internasional. Studi World Bank (2022) menunjukkan bahwa pengembangan pelabuhan modern dapat meningkatkan daya saing ekspor suatu negara melalui efisiensi distribusi barang ke pasar global.

Konektivitas udara juga menjadi bagian integral dari infrastruktur wilayah. Pengembangan bandara baru dan perluasan kapasitas bandara eksisting, seperti Bandara Kertajati di Jawa Barat dan Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar, mendukung mobilitas penumpang dan kargo. Transportasi udara sangat penting bagi wilayah kepulauan dan daerah terpencil, terutama dalam distribusi barang bernilai tinggi atau yang memerlukan pengiriman cepat, seperti produk perikanan segar atau obat-obatan (Kemenhub, 2024).

Integrasi antar moda transportasi menjadi tantangan sekaligus peluang dalam pengembangan konektivitas wilayah. Penerapan sistem multimodal transport memungkinkan distribusi barang yang lebih efisien melalui penggabungan transportasi darat, laut, dan udara secara terkoordinasi. Menurut Asian Development Bank (2023), integrasi ini tidak hanya menghemat biaya logistik tetapi juga meningkatkan ketahanan rantai pasok, terutama dalam menghadapi gangguan seperti bencana alam atau fluktuasi harga energi.

Ke depan, pembangunan infrastruktur konektivitas harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan teknologi. Penerapan teknologi digital dalam sistem transportasi, seperti intelligent transport system (ITS) dan digitalisasi logistik, dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Dengan kombinasi pembangunan fisik dan inovasi teknologi, infrastruktur konektivitas di Indonesia berpotensi menjadi pendorong

utama pertumbuhan ekonomi wilayah yang inklusif dan berdaya saing tinggi di tahun 2025 dan seterusnya.

Dampak Infrastruktur Terhadap Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi

Ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi salah satu faktor kunci dalam menarik investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Infrastruktur yang baik menurunkan biaya produksi dan distribusi, sehingga meningkatkan daya tarik suatu daerah bagi investor. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM, 2024) menunjukkan bahwa daerah dengan infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi yang memadai memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata 2% lebih tinggi dibandingkan daerah dengan infrastruktur terbatas.

Pembangunan infrastruktur juga berperan sebagai katalisator pertumbuhan sektor industri dan jasa. Akses jalan yang memadai, pasokan listrik yang stabil, serta ketersediaan jaringan komunikasi mendorong perkembangan kawasan industri dan pusat perdagangan baru. Menurut teori New Economic Geography yang dikemukakan oleh Krugman (1991), infrastruktur yang efisien dapat memperkuat aglomerasi ekonomi, sehingga memunculkan kluster industri yang saling terhubung dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Selain menarik investor baru, infrastruktur yang baik juga mempertahankan keberlanjutan investasi yang sudah ada. Perusahaan cenderung melakukan ekspansi ketika biaya logistik rendah, akses ke bahan baku lancar, dan konektivitas pasar terjaga. Studi World Bank (2022) menyebutkan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur dapat memperbaiki iklim investasi melalui penurunan risiko operasional dan peningkatan kepastian usaha.

Dampak positif infrastruktur terhadap investasi juga terlihat pada sektor pariwisata. Pembangunan bandara, pelabuhan, dan jalan menuju destinasi wisata meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Peningkatan jumlah wisatawan ini memicu pertumbuhan usaha kecil dan menengah di sekitar destinasi, yang pada akhirnya berkontribusi pada pendapatan daerah. Menurut data Kementerian Pariwisata (2024), daerah dengan akses infrastruktur memadai mencatatkan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata hingga 15% per tahun.

Namun, manfaat infrastruktur terhadap investasi tidak terjadi secara otomatis. Perencanaan yang buruk, keterlambatan proyek, atau kualitas infrastruktur yang rendah dapat mengurangi minat investor. Calderón dan Servén (2010) menegaskan bahwa kualitas infrastruktur lebih berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan kuantitas semata. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan dengan tata kelola yang transparan, pengawasan ketat, dan sesuai dengan kebutuhan wilayah.

Ke depan, strategi pembangunan infrastruktur untuk mendukung investasi harus diarahkan pada peningkatan konektivitas antarwilayah, penguatan pasokan energi bersih, dan percepatan transformasi digital. Pendekatan ini sejalan dengan visi pembangunan Indonesia 2045 yang menempatkan infrastruktur sebagai fondasi daya saing nasional. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terjaga secara inklusif.

Pemerataan Pembangunan Dan Pengurangan Kesenjangan Wilayah

Pembangunan infrastruktur di luar Jawa menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah. Proyek strategis seperti pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Bitung, Sulawesi Utara, dan Sorong, Papua Barat, dirancang untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam setempat dan meningkatkan daya tarik investasi. Kehadiran KEK diharapkan dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terintegrasi dengan jaringan logistik nasional maupun internasional (Bappenas, 2024).

Meskipun memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi lokal, realisasi pemerataan pembangunan infrastruktur masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan pembiayaan menjadi tantangan utama, mengingat pembangunan infrastruktur

berskala besar membutuhkan investasi jangka panjang. Selain itu, perencanaan yang kurang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah seringkali menyebabkan proyek infrastruktur tidak optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah (ADB, 2023).

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) teknis di daerah juga menjadi hambatan dalam pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur. Daerah terpencil dan kepulauan kerap kekurangan tenaga ahli untuk mengoperasikan dan memperbaiki fasilitas yang ada, sehingga mengurangi efektivitas infrastruktur yang dibangun. Studi World Bank (2022) menegaskan bahwa kapasitas institusional daerah memegang peran penting dalam memastikan keberlanjutan manfaat infrastruktur.

Pemerataan pembangunan infrastruktur tidak hanya bertujuan menghubungkan wilayah secara fisik, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang setara. Infrastruktur yang merata dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan pasar kerja, sehingga memperkecil kesenjangan pendapatan. Konsep *inclusive infrastructure* yang dikembangkan OECD (2021) menekankan bahwa pembangunan harus dirancang untuk memberikan manfaat yang adil bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan dan daerah tertinggal.

Ke depan, strategi pemerataan pembangunan perlu mengintegrasikan pendekatan berbasis potensi lokal, pembiayaan kreatif seperti skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan penguatan kapasitas daerah. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur di luar Jawa tidak hanya menjadi simbol pemerataan, tetapi juga motor penggerak transformasi ekonomi yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Tantangan dan Strategi

Pembangunan infrastruktur Indonesia pada tahun 2025 dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan teknis yang perlu segera diatasi agar tujuan pemerataan ekonomi dapat tercapai. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran pemerintah, di mana alokasi belanja modal harus bersaing dengan kebutuhan sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan (Kemenkeu, 2024). Di sisi lain, ketergantungan pada pembiayaan APBN membuat proyek infrastruktur rentan terhadap perubahan kondisi fiskal dan ekonomi global, seperti fluktuasi harga komoditas atau perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia.

Selain keterbatasan anggaran, tantangan lainnya terletak pada koordinasi lintas instansi dan lintas tingkat pemerintahan. Pembangunan infrastruktur seringkali melibatkan kementerian, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota, yang masing-masing memiliki prioritas dan mekanisme kerja berbeda (Bappenas, 2024). Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih program, keterlambatan penyelesaian proyek, serta kurangnya sinergi dalam pemanfaatan infrastruktur.

Dari sisi teknis, isu ketahanan infrastruktur terhadap perubahan iklim menjadi perhatian penting di tahun 2025. Peningkatan frekuensi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gelombang pasang berpotensi merusak infrastruktur yang sudah dibangun, sehingga meningkatkan biaya pemeliharaan dan perbaikan (UNDRR, 2023). Oleh karena itu, konsep *climate-resilient infrastructure* atau infrastruktur tangguh bencana menjadi strategi yang harus diintegrasikan sejak tahap perencanaan hingga operasional.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, strategi pembiayaan kreatif seperti *Public Private Partnership* (PPP) dapat menjadi solusi efektif. Skema ini memungkinkan keterlibatan pihak swasta dalam pendanaan, pembangunan, hingga pengelolaan infrastruktur, dengan imbalan tertentu seperti konsesi atau pembagian keuntungan (World Bank, 2022). Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal seperti keringanan pajak atau kemudahan perizinan untuk mendorong partisipasi swasta.

Strategi lainnya meliputi pengembangan infrastruktur berbasis potensi ekonomi lokal, penguatan tata kelola proyek melalui transparansi dan akuntabilitas anggaran, serta memastikan pembangunan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur di tahun 2025 tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan dan ketahanan wilayah dalam menghadapi tantangan global.

KESIMPULAN

Pembangunan infrastruktur pada tahun 2025 memegang peranan vital dalam pengembangan ekonomi wilayah di Indonesia. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan konektivitas, daya saing, dan pemerataan pembangunan, serta menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Meski demikian, keberhasilan pembangunan infrastruktur memerlukan sinergi kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Ke depan, strategi percepatan pembangunan berbasis wilayah, penguatan investasi, dan integrasi kebijakan lintas sektor menjadi kunci untuk memaksimalkan peran infrastruktur dalam pembangunan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustin, I. W., & Hariyani, S. (2023). *Pengelolaan Infrastruktur Kota dan Wilayah*. Universitas Brawijaya Press.
- Al-Ma'ruf, A. I. (2012). *Metode Penelitian*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Arsyad, Lincolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Asian Development Bank. (2023). *Regional Infrastructure Development Strategies*. Manila: ADB.
- Aulia, S., Anisa, S. N., Indah, A., Dipa, M. A. K., & Panorama, M. (2024). Analisis peran infrastruktur dalam pertumbuhan ekonomi pembangunan di Kota Palembang. *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi (JUPEA)*, 4(1), 36-54.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2024). *Laporan Realisasi Investasi Triwulanan 2024*. Jakarta: BKPM.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2024). *Laporan Pembangunan Wilayah 2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Jakarta: BPS.
- Banerjee, A., Duflo, E., & Qian, N. (2012). *On the Road: Access to Transportation Infrastructure and Economic Growth in China*. NBER Working Paper No. 17897.
- Bank Dunia. (2022). *Infrastructure for Development*. Washington, D.C.: World Bank.
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Calderón, C., & Servén, L. (2010). Infrastructure and economic development in Sub-Saharan Africa. *Journal of African Economies*, 19(suppl_1), i13-i87.
- Chow, V. (2015). *Infrastructure and Economic Development*. New York: Oxford University Press.
- Disasmita, R. (2013). *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Djadjuli, D. (2018). Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 8-21.
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Penerbit Erlangga, Yogyakarta.
- Fahmi, A. (2022). Efek spasial infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi. *Akuntabel: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 19(2), 468-474.
- Firdaus, M. (2022). *Dampak Infrastruktur Transportasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada.
- Gultom, R. Z., & Tini, A. Q. (2020). Pembangunan infrastruktur dalam Islam: Tinjauan ekonomi dan sosial. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 203-211.
- Hernovianty, F. R. (2021). Peran Pembangunan Infrastruktur Dalam Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kabupaten Mempawah. *Uniplan: Journal of Urban and Regional Planning*, 2(1), 9-16.
- Imsar, I., & Zaman, M. Q. (2024). Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ekonomi Regional Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 14(2), 42-48.
- Jannah, M., & Kurniati, E. (2025). Analisis Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Infrastruktur Sebagai Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1), 231-251.
- Jhingan, M. L. 2003. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2024). *Statistik Ketenagalistrikan Nasional 2024*. Jakarta: Kementerian ESDM.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2024). *Laporan Infrastruktur Digital Nasional 2024*. Jakarta: Kominfo RI.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2024). *Statistik Pariwisata Nasional 2024*. Jakarta: Kemenparekraf.
- Kementerian Perhubungan. (2024). *Laporan Kinerja Infrastruktur Transportasi 2024*. Jakarta: Kemenhub RI.
- Kementerian PUPR. (2023). *Rencana Strategis Pembangunan Infrastruktur Nasional*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Krugman, P. (1991). Increasing returns and economic geography. *Journal of political economy*, 99(3), 483-499.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Kusuma, M. E., & Muta'ali, L. (2019). Hubungan pembangunan infrastruktur dan perkembangan ekonomi wilayah Indonesia. *Jurnal Bumi Indonesia*, 8(3).
- Lincoln, A. (1997). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Mankiw, N. G. (2018). *Principles of Economics (8th ed.)*. Boston: Cengage Learning.
- Mulyadi, M. (2011). *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Nadi Pustaka.
- Murni, Asfia. (2006). *Ekonomika Makro*. Bandung: PTRefika Aditama.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- OECD. (2021). *Inclusive Infrastructure and Social Equity*. Paris: OECD Publishing.
- Oktaviani, V. R., Lestari, A., Prayudha, G. A., & Malik, A. (2024). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 9882-9892.
- Perroux, F. (1955). *Note sur la notion de pole de croissance*, in "Économie appliquée", no. 8.
- Prasetyo, R. B., & Firdaus, M. (2009). Pengaruh infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 2(2), 222-236.
- Puspitasari, M., & Fikriyah, V. N. (2022). *Hubungan Antara Pembangunan Infrastruktur Dengan Perkembangan Ekonomi Wilayah Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Putong, Iskandar. (2013). *Economics Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- RPJMN 2020-2025. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional*. Jakarta: Bappenas.
- Sabilillah, M., Shadrina, N., Nurjannah, N., & Ginting, J. (2025). Peran Infrastruktur dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Tertinggal Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE)*, 3(1), 86-90.
- Samuelson & Nordhaus. (2005). *Economics 8th Edition*. New York: Mc Graw Hill-Irwin.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: LPFE UI.
- Sukirno, Sadono. (2016). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sukwika, T. (2018). Peran pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 6(2), 115-130.
- Sulistyorini, R. (2021). Peran Infrastruktur Transportasi Dalam Pengembangan Provinsi Lampung. *Jurnal Transportasi*, 21(1), 55-62.
- Tarigan, Robinson. (2005). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi, Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development (13th ed.)*. Harlow: Pearson Education.
- Warsilan, W., & Noor, A. (2015). Peranan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan implikasi pada kebijakan pembangunan di kota samarinda. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 31(2), 359-366.
- World Bank. (2022). *Infrastructure for Development*. Washington, D.C.: World Bank.

Yolanda, C., & Hasanah, U. (2024). Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pengembangan ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170-186.